



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN JARO TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

JARO, 5 Agustus 2025

Camat JARO,

MAHMUD RIYADI, S.Sos.Kp
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197312091994031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan.....	6
2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025	6
2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025	13
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah	19
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	22
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
 BAB IV PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Jaro Tahun 2025 dengan APBD Kecamatan Jaro Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaran pada Renja dan APBD Kecamatan Jaro Tahun 2025	9
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jaro sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaro	13
Tabel 2.4		19
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tabalong	24
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Jaro Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja P) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025. Renja Tahun 2025 telah disusun pada tahun 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKPA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Jaro Tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-77/BAPPERIDA/000.7/III/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Jaro Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2026 yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaro Tahun 2025 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tuga Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong;
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2) Tanggal 1 Agustus 2025
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14);
 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26) Tanggal 1 Agustus 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

2. Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kehidupan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan
 - 2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025
 - 2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Jaro sampai dengan triwulan II tahun 2025 dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Jaro Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Jaro dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,
4. Program Koordinasi 1Ketentraman Dan Ketertiban Umum,
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Jaro Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Jaro dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah kegiatan dalam renja sama dengan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD, yaitu ada 13 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa,
10. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan kelurahan,
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dan
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Jaro Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap Sub Kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Jaro dengan APBD Tahun 2025, jumlah sub kegiatan yang ada pada renja tahun 2025 sebanyak 34 sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD Tahun 2025 sebanyak 34.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Perubahan Kecamatan Jaro Tahun 2025 dengan APBD Perubahan Tahun 2025

Anggaran Renja Perubahan Kecamatan Jaro Tahun 2025 sebesar Rp. 4.369.454.635,- sedangkan anggaran APBD Kecamatan Jaro Tahun 2025 sebesar Rp. 4.199.509.724,- Terdapat selisih antara anggaran Renja Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp169.944,911,-.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Jaro Tahun 2025 dengan APBD Kecamatan Jaro Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Perubahan Kecamatan Jaro Tahun 2025
dengan APBD Perubahan Kecamatan Jaro Tahun 2025

No	Uraian	Renja Perubahan2025	APBD Perubahan 2025
1	Program	6	6
2	Kegiatan	14	13
3	Sub Kegiatan	39	34
4	Pagu Anggaran	Rp 4.369.454.635	Rp 4.199.509.724

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Anggaran pada Renja Perubahan dan APBDP Kecamatan JARO Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA PERUBAHAN 2025		APBD PERUBAHAN 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	UNSUR KEWILAYAHAN			4.369.454.635		4.199.509.724
7.01	KECAMATAN			4.369.454.635		4.199.509.724
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (predikat)	B	3.910.523.970	B	3.769.207.257
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	21.072.728	8 Dokumen	21.072.728
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra/Renja, Renstra-P/Renja-P	2 Dokumen	2.200.000	2 Dokumen	2.200.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000	1 Dokumen	1.100.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000	1 Dokumen	1.100.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.250.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.080.000	1 Dokumen	1.080.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	1.100.000	1 Dokumen	1.100.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	1 Dokumen	1.090.000	1 Dokumen	1.090.000
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data Statistik Sektoral daerah	20 Data	12.152.728	20 Data	12.152.728
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	3.069.989.000	20 Dokumen	2.555.131.715
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.069.139.000	14 Bulan	3.069.139.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahunan SKPD	2 Laporan	150.000	2 Laporan	150.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	700.000	18 Laporan	700.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	829.120	3 Dokumen	829.120
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD					829.120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA PERUBAHAN 2025		APBD PERUBAHAN 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	36.000.000	-	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18	36.000.000	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	378.032.381	100%	304.100.343
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	1 Paket	5.113.380	1 Paket	5.113.380
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	14.837.350	1 paket	30.345.062
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	4 paket	9.530.504	4 paket	9.530.504
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	3 Paket	15.194.643	3 Paket	15.194.643
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	142.470.920	12 Laporan	170.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	223.080.825	100%	80.727.320
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	50.180.078	-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	7 Paket	116.687.390	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	7 Unit	56.213.357	16 Unit	80.727.320
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	100%	255.762.500	100%	255.762.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	225.762.500	12 Laporan	225.762.500
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	33 Unit	110.643.000	33 Unit	110.643.000

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor	8 Unit	91.560.000	8 Unit	91.560.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	25 Unit	19.083.000	25 Unit	19.083.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	85%	133.954.030	85%	85.261.400
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	133.954.034	3 Laporan	85.261.400
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA Perubahan 2025		APBD Perubahan 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Kegiatan MTQ	1 Laporan	113.060.600	1 Laporan	66.378.600
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Forum Kecamatan Sehat	1 Laporan	18.882.800	2 Laporan	18.882.800
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	85%	42.583.600	85%	74.380.600
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	9 Desa	16.034.600	9 Desa	17.384.600
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Desa	4.760.000	9 Desa	4.760.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Desa	11.274.600	9 Desa	12.624.600
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	85%	25.549.000	85%	55.996.000
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	25.549.000	100 Keluarga	55.996.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	9 Desa	44.650.000	9 Desa	44.650.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	9 Patroli Terpadu	44.650.000	9 Patroli Terpadu	44.650.000

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Patroli Terpadu Pembinaan Kamtibmas / FORKOPIMCA	9 Patroli Terpadu	41.650.000	9 Patroli Terpadu	41.650.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9 Laporan	3.000.000	9 Laporan	3.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	85%	174.763.273	85%	159.520.075
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	174.763.273	1 Laporan	159.520.075
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Kegiatan Peringatan HUT RI	1 Laporan	174.763.273	1 Laporan	159.520.075

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA Perubahan 2025		APBD Perubahan 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	85%	64.990.392	85%	66.490.392
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan Desa yang di bina dan di awasi	9 Desa	64.990.392	9 Desa	66.490.392
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen APBDes dan SISKEUDES	9 Dokumen	25.300.000	9 Dokumen	26.800.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	12.199.200	9 Dokumen	12.199.200
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	19.491.192	9 Dokumen	19.491.192
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	8.000.000	9 Laporan	8.000.000

Berdasarkan data perbandingan antara Renja Perubahan 2025 dan APBDP 2025 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBDP disusun masih mengacu pada Renja Perubahan, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja Perubahan menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD Induk sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jaro sampai triwulan II tahun 2025.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Jaro sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	UNSUR KEWILAYAHAN		4.139.113.134		1.132.399.185	43,59%	28,84%	
7.01	KECAMATAN		4.139.113.134		1.132.399.185	43,59%	28,84%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP (predikat)	3.764.280.982	B	1.727.598.608	45,83%	-	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	23.922.728	8 Dokumen	2.631.900	12,49%	55%	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	2 Dokumen	0	0,00%	4 Dokumen	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1.100.000	1 Dokumen	0	0,00%	-	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000	1 Dokumen	607.200	55,20%	55%	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1.250.000	1 Dokumen	674.700	53,98%	55%	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.080.000	1 Dokumen	0	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja	1.100.000	4 Laporan	0	0,00%	2 Laporan	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	1.090.000	1 Dokumen	0	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12.152.728	20 Data	1.350.000	11,11%	45%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3.069.989.000	20 Dokumen	1.520.087.805	49,51%	50%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	3.069.139.000	14 Bulan	1.520.087.805	49,53%	7 Bulan	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000	3 Laporan	0	0,00%		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	700.000	1 laporan	0	0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Perangkat Daerah	1.129.120	100%	0	0%	45%	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Baarang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Baarang Milik Daerah SKPD	1.129.120	100%	0	0%	45%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.230.314	100%	75.268.466	32,70%	50%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	5.146.680	12 Bulan	0	0%	6 Bulan	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.518.795	12 Bulan	5.586.000	18,41%	50%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6.276.184	12 Bulan	1.287.000	13,50%	50%	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	17.330.855	12 Bulan	2.400.000	15,80%	50%	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	205.957.800	12 laporan	65.995.466	38,82%	50%	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Alat yang Dibeli	46.000.000	2 Unit	0	0%	2 Unit	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	46.000.000	2 Unit	0	0%	2 Unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.762.500	100%	95.186.537	37,22%	50%	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	30.000.000	12 Bulan	9.034.037	30,11%	50%	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.762.500	12 Bulan	86.152.500	38,16%	50%	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	110.643.000	33 Unit	34.423.900	31,11%	45%	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor	91.560.000	8 Buah	32.803.900	35,83%	45%	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	19.083.000	25 Unit	1.620.000	8,49%	40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	83.315.400	85%	8.025.000	9,41%	25%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	83.315.400	3 Laporan	8.025.000	9,41%	25%	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Kegiatan MTQ	62.432.600	1 Laporan	0	0,00%	1 Laporan	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.282.800	2 Laporan	8.025.000	42,50%	30%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	63.688.600	85%	13.700.000	18,42%	40%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	21.634.600	9 Desa	3.100.000	17,83%	35%	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.010.000	9 Lembaga	400.000	8,40%	40%	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Pemerintahan Desa yang dibina/diberdayakan	12.624.600	9 Desa	2.700.000	21,39%	40%	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	42.054.000	100 Keluarga	10.600.000	24,60%	40%	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan	42.054.000	100 Keluarga	10.600.000	24,60%	40%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	47.850.000	9 Desa	21.660.000	48,51%	51%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	47.850.000	9 Patroli Terpadu	21.660.000	48,51%	51%	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Patroli Terpadu Pembinaan Kamtibmas / FORKOPIMCA	42.900.000	9 Patroli Terpadu	21.060.000	50,56%	58%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.750.000	9 Laporan	600.000	20,00%	45%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	105.537.760	85%	4.950.000	3,10%	45,95%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	105.537.760	1 Laporan	4.950.000	3,10%	45,95%	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.537.760	1 Laporan	4.950.000	3,10%	45,95%	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	74.640.392	85%	44.409.000	66,79%	55%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	74.640.392	9 Desa	44.409.000	66,79%	55%	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.750.000	9 Dokumen	18.700.000	69,78%	70%	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.399.200	9 Dokumen	4.065.000	33,32%	50%	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.491.192	9 Dokumen	18.944.000	97,19%	100%	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.000.000	9 Laporan	2.700.000	33,75%	52%	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Jaro sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Jaro telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.820.342.608,- atau sekitar 43,35 persen dari total anggaran untuk tahun 2025. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya kegiatan tersebut dijadwalkan pada triwulan III dan IV, diantaranya yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Jaro mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Mengkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
7. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
9. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jaro menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jaro, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Jaro mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan Jaro memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

Fungsi Kecamatan Jaro adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Keamanan dan Ketertiban Umum.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Kecamatan Jaro berpangku pada visi Kabupaten Tabalong " **menuju Tabalong SmaRT " (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)** dengan mengemban misi :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat : Memastikan akses merata ke layanan dasar, mendorong ekonomi berkelanjutan, dan mendukung UMKM serta pertanian.
2. Mendorong kemajuan Tabalong : Membangun infrastruktur modern, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan ketereampilan kerja.
3. Memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan : memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menerapkan nilai religius dalam kebijakan.
4. Menjadikan Tabalong Daerah yang terdepan : Mengutamakan inovasi pelayanan publik, memaksimalkan potensi lokal dan berkomitmen pada transparansi serta akuntabilitas.

Mewujudkan Tabalong SmaRT sebagai daerah yang sejahtera dan maju, dengan mengedepankan nilai-nilai religius serta menjadi yang terdepan di berbagai bidang. Dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan, Tabalong siap menjadi daerah yang unggul dan membanggakan.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Jaro dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Sarana dan prasarana Pelayanan yang masih belum memadai, contohnya untuk fasilitas pelayanan kepada disabilitas masih belum tersedia di Kantor Kecamatan Jaro. Akan tetapi sudah dianggarkan pada pagu

Perubahan untuk pemeliharaan gedung kantor / rehab / perbaikan dan penambahan parkir untuk kendaraan sehingga kedepannya untuk pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalitas aparatur Kecamatan Jaro.
3. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja dikalangan aparatur Kecamatan Jaro menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
4. Jumlah SDM Aparatur yang masih kurang memadai.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Jaro juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Jaro dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabalong, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Jaro yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*).

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Jaro adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Kecamatan Jaro merupakan kawasan yang terindikasi memiliki Kawasan kumuh. Untuk mengurangi kekumuhan, mindset masyarakat perlu diubah sehingga tercipta kawasan tanpa kumuh

2. Bidang Pemerintahan

Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan Kecamatan Jaro untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

4. Bidang Pertanian

Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Jaro. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamatan Jaro untuk dijadikan perumahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam revidi ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Kecamatan Jaro. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tabalong

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Perubahan 2025				
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)		100%	44.650.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)		100%	44.650.000
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	Kecamatan JARO	9 Patroli Terpadu	44.650.000	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	Kecamatan JARO	Patroli Terpadu	44.650.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan Desa		85%	42.583.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan Desa		85%	74.380.600
7.01.03.2.01	2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	Kecamatan JARO	14 Desa	4.760.000	2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	Kecamatan JARO	14 Desa	17.384.600
7.01.03.2.06	3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan JARO	1400 Keluarga	25.549.000	3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan JARO	1400 Keluarga	55.996.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		85%		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen Penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		85%	JARO
7.01.05.2.01	4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan JARO	1 Laporan	174.763.273	4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan JARO	1 Laporan	159.520.075

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Perubahan 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		85%	66.490.392	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		85%	66.490.392	Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga
7.01.06.2.01	5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	Kecamatan JARO	14 Desa	66.490.392	5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	Kecamatan JARO	14 Desa	66.490.392	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan		85%	133.954.030	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan		85%	85.261.400	
07.01.02.2.01	6 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan JARO	3 Laporan	133.954.030	6 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan JARO	3 Laporan	85.261.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP (predikat)		B	3.910.523.970	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP (predikat)		B	3.769.207.257	Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga
7.01.01.2.01	7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	Kecamatan JARO	8 Dokumen	21.072.728	7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	Kecamatan JARO	8 Dokumen	21.072.728	
7.01.01.2.02	8 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kecamatan JARO	20 Dokumen	3.069.989.000	8 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kecamatan JARO	20 Dokumen	2.555.131.715	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN perubahan 2025					Catatan Penting	
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
7.01.01.2.06	9 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan JARO	100%	378.032.381	9 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	JARO	100%	304.100.343		
7.01.01.2.07	10 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan yang di beli	Kecamatan JARO		223.080.825	10 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan yang di beli	Kecamatan JARO	100%	80.727.320		
7.01.01.2.08	11 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan JARO	100%	255.762.500	11 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan JARO	100%	255.762.500		
7.01.01.2.09	12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	Kecamatan JARO	35 Unit	110.643.000	12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	Kecamatan JARO	32 Unit	110.643.000		
JUMLAH					4.369.454.635	JUMLAH					4.199.509.724	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 merencanakan 6 program, 13 kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong senilai **Rp. 4.199.509.724,-**. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DEARAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.769.207.257,- indikator program ini adalah : Persentase layanan umum lainnya tepat waktu dengan target 85% dan Nilai SAKIP (predikat) dengan target B sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan anggaran sebesar Rp. 85.261.400,- indikator program ini adalah : Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Masyarakat di tingkat kecamatan dengan target 85% sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan rincian sub kegiatan :
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,

Dengan anggaran sebesar Rp. 74.380.600,- indikator program ini adalah : Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa dengan target 85% sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
 - Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, DENGAN RINCIAN Sub Kegiatan :
 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dengan anggaran sebesar Rp. 44.650.000,- indikator program ini adalah Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan) dengan target

9 Desa sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian sub kegiatan :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM,

Dengan anggaran sebesar Rp. 159.520.075,- indikator program ini adalah : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 85% sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan anggaran sebesar Rp. 66.490.392,- indikator Program ini adalah : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa dengan Target 85 % sedangkan Kegiatannya meliputi :

- a. Fasilitas, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
 - Fasilitas administrasi tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Jaro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jaro ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Jaro Tahun 2025-2029, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jaro ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Jaro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.
- 2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Tabalong khususnya di Kecamatan Jaro.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

JARO, 5 Agustus 2025
CAMAT JARO

H. MAHMUD RIYADI, S.Sos,Kp
NIP. 19900502 201010 1 001